DILEMA ISU ASYLUM SEEKER SEBAGAI IMIGRAN WORKER DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG

EVIT NURUL SETIANNY (20160510006)

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
evit.nurul.2016@fisipol.umy.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba menggambarkan krisis pengungsi global secara umum dan kebijakan luar negeri Jepang terhadap krisis pengungsian global pada khususnya. Jepang sebagai negara pemukiman kembali harus menerima pencari suaka. Tetapi Jepang memiliki kebijakan di mana pencari suaka tidak hanya melamar suaka tetapi juga sebagai pekerja imigran. Namun, Jepang hanya menerima sangat sedikit pencari suaka sebagai pekerja imigran setiap tahun. Di satu sisi, Jepang sedang mengalami krisis kekurangan domestik pekerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan dari data sekunder dari buku, internet, jurnal, artikel, laporan tertulis, majalah, dan dokumen lainnya dianalisis secara kualitatif.

Kata kunci*: Krisis Pengungsi Global, Pencari Suaka, Pekerja Imigran, Jepang, Imigrasi*

ABSTRACT

This research try to describes the global refugee crisis in general and Japan's foreign policy towards the global refugee crisis in particular. Japan as a resettlement country should accept asylum seekers. But Japan has a policy whereby asylum seekers not only apply for asylum but also as immigrant workers. However, Japan only receives very few asylum seekers as immigrant workers each year. On one hand, Japan is experiencing a crisis of shortages of domestic workers. The method used in this research is descriptive analytic method. Data collection techniques gathered from secondary data from books, the internet, journals, articles, written reports, magazines, and other documents were analyzed qualitatively

Keywords*: The Global Refugee Crisis, Asylum Seeker, Immigrant Worker, Japan, Immigration*

I. PENDAHULUAN

Krisis pengungsi global dimulai pada saat Perang Dunia II ketika banyaknya pengungsi yang merupakan korban Nazi Jerman yaitu kelompok Yahudi yang di persekusi dan dianiaya pada tahun 1930-an (Martin, 2016). Krisis pengungsi global ini terdiri dari migran, pengungsi, *stateless person*, Internal Displace Persons dan pencari suaka (Nasr & Fisk, 2018).

Krisis pengungsi global berlanjut selama rentang tahun 1980an sampai 1990an dan juga pada awal tahun 2011, dikarenakan adanya peperangan, diskriminasi etnis dan agama, pergolakan politik seperti yang terjadi pada fenomena Arab Spring tahun 2011, dan berbagai pelanggaran atas hak asasi manusia lainnya (Betts, Loescher, & Milner, 2012). Dunia terus menghadapi krisis pengungsi global setiap harinya. Laporan UNHCR menyatakan bahwa pada tahun 2016 terdapat 22,5 juta jiwa pengungsi dan yang lebih mengkhawatirkan adalah lebih dari setengah angka tersebut tergolong berusia di bawah 18 tahun. Ada sekitar 24 pengungsi setiap menitnya, UNHCR harus memindahkan sekitar 34.000 pengungsi setiap hari (Nasr & Fisk, 2018).

Jepang merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951 dan Protokol tentang Kedudukan Pengungsi 1967 (*1951 Convention Regarding the Status of Refugees and protocol 1967 Protocol Relating To the Status Of Refugee*) sejak tahun 1981 (Shahrullah & Aburto, 2012). Akan tetapi selama 37 tahun setelah meratifikasi, Jepang hanya menerima kurang dari 100 orang pencari suaka setiap tahunnya (Takizawa, 2019). Kebijakan Imigrasi Jepang mengharuskan para pencari suaka yang tiba di Jepang tidak hanya sebagai pengungsi tetapi juga pekerja imigran. Jepang juga menjadi *Resettlement Country* (negara tujuan) pengungsi global bersama dengan negara yang tergabung dalam G8 plus seperti Amerika Serikat, Prancis, Kanada, Jerman Italia, Rusia, United Kingdom, serta plus Australia dan Korea Selatan (Burgees, 2007).

Jepang merupakan negara G8 plus yang menerima pencari suaka paling sedikit. Angka penerimaan suaka asing di Jepang masing terbilang rendah yakni hanya 2% dari seluruh penduduknya jika dibandingkan dengan Korea Selatan yang mencapai 4%, kemudian Prancis dengan 16% (Obe M. , 2018) dan Jerman yang menyetujui 256.000 pemohon suaka pada tahun 2016 (Wilson, 2017). Seringkali mendapat gelar negara yang memusuhi imigran, sebagai negara demokrasi industri maju, Jepang memang telah menutup perbatasan untuk buruh imigran tidak terampil sejak akhir Perang Dunia II. Meski demikian, jumlah warga negara asing memang tumbuh dengan angka mencapai 2,6 juta jiwa pada tahun 2017 atau kurang dari 2% dari total populasi penduduk Jepang pada tahun tesebut (Tian & Chung, 2018).

Sebelumnya, Jepang menjadi negara tujuan pengungsi negara tetangga seperti Cina dan Korea Utara. Jejak imigrasi telah tercatat sejak akhir tahun 1800an ketika berlangsungnya Restorasi Meiji. Jejak imigrasi pertama tercatat pada kota-kota dengan pelabuhan utama. Kemudian ekspansi yang dilakukan kekaisaran Jepang selama era kolonial (1905-1945) memicu masuknya imigran asal Cina, Taiwan dan Korea sebagai mayoritas yang mewakilin penduduk kolonial di tanah Jepang. Para imigran tersebut dahulunya tidak di anggap imigran karena mereka datang dari wilayah yang telah diekspansi oleh Jepang. Pasca Perang Dunia II, para imigran tersebut kehilangan kewarganegaraan Jepang sehingga mereka yang masih tinggal dan anak-anak yang lahir di Jepang dianggap sebagai warga asing. Sampai saat ini mereka dikenal dengan sebutan Zainichi (Green, 2017).

Di satu sisi, pada bulan Mei tahun 2018, Jepang tengah mencapai titik tertinggi ketersediaan lapangan pekerjaan selama 44 tahun terakhir dengan rasio perbandingan 160:100 di setiap Prefektur. Jepang membutuhkan sekitar 60% pekerja asing dari total seluruh pekerja di Jepang saat ini. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya industri manufaktur dan inovasi teknologi Jepang (Lufkin, 2018). Menurut laporan Kyodo News tahun 2018, jumlah pekerja asing yang menetap di Jepang sebanyak 1,3 juta jiwa (Reynolds, 2018). Tenaga Kerja memiliki pengertian yang lebih universal dari pekerja pada bagian tertentu. Tenaga kerja sering kali dikaitkan dengan buruh yang hanya mengandalkan tenaga saja. Tenaga kerja ialah setiap orang yang melakukan jenis pekerjaan dengan melibatkan tidak hanya tenaga tetapi pemikiran, tujuan, sasaran, respon kebutuhan serta kepuasan yang tidak dapat diukur dengan skala apapun (Cochrane, 1947). Tenaga kerja memiliki peranan yang cukup penting. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara didukung oleh tenaga kerja dan modal. Paska perang dunia ke II, Jepang bangkit dari kekalahan perang dan mulai membangun ekonomi atas dukungan kualitas tenaga kerja dalam negeri yang cukup tinggi (Watanabe, 1972). Jepang memiliki pengalaman kekurangan tenaga kerja dimulai dari tahun 1967 hingga 1974 disaat dunia sedang mengalami krisis minyak dan resesi sehingga permintaan akan tenaga kerja berkurang (Bartram, 2000). Adapun sektor yang paling banyak membutuhkan *blue-collar* (tenaga kerja fisik) yakni di bagian pertanian, sektor industri, gelanggang kapal, hospitality, hotel, dan usaha ritel. 30% dari jumlah tenaga kerja di Jepang saat ini sebagian besar berasal dari China, Vietnam, Filipina dan Brazil (Lufkin, 2018).

Adanya kebijakan Jepang yang membatasi jumlah Penerima suaka untuk pengungsi dan pekerja asing menyebabkan Badan Pengungsi PBB (UNHCR) mendesak Jepang agar menerima lebih banyak pencari suaka. Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi, UNHCR menyatakan bahwa jumlah tersebut tentu sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah para pencari suaka dan yang mengajukan permohonan ke Jepang (Hutapea, 2017). Selain menjadi *Resettlement Country*, Jepang juga telah menandatangai Konvensi dan Protokol mengenai status pengungsi (*1951 Convention Regarding the Status of Refugees and 1967 Protocol Relating to the Status of Refugee)*.

Jepang merupakan salah satu negara yang paling tidak ramah terhadap pengungsi di dunia serta menerapkan kebijakan yang sangat ketat. Sebelum mendatangi Jepang, para pengungsi sudah harus memiliki visa jika tidak ingin ditahan atau tidak diizinkan mencari status pengungsi. Bagi imigran yang melarikan diri dari negara konflik, mendapatkan visa tentu merupakan hal yang sangat sulit mengingat pembuatan visa tentu memerlukan waktu dan dokumen identitas (Chan, 2018). Pada tahun 2010 Jepang mengadopsi sistem pemberian izin kerja bagi para pencari suaka yang permohonannya telah diterima. Pencari suaka diberikan izin kerja 6 bulan setelah mereka mengajukan status pengugsi sebagai bentuk keringanan dan akomodasi finansial bagi para pencari suaka selama proses mendapatkan status pengungsi. Jepang kemudian membatasi sistem tersebut pada tahun 2018 seiring dengan kenaikan jumlah pemohon suaka. Pembatasan ini diyakini adanya kesalahpahaman dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh para pencari suaka. Mekera memanfaatkan momentum penerimaan suaka untuk mencari pekerjaan (The Guardian, 2017).

Namun melihat kembali pengalaman Jepang terhadap krisis kekurangan tenaga kerja yang menimbulkan pertanyaan mengapa Jepang terus menolak dan membatasi arus imigrasi yang masuk ke Jepang disaat Jepang dapat memanfaatkan para pencari

suaka sebagai tenaga kerja. Adalah hal yang menarik untuk meneliti mengapa Jepang membatasi penerimaan pencari suaka disaat Jepang telah menandatangani Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi dan disatu sisi Jepang dapat memanfaatkan pencari suaka tersebut sebagai pekerja imigran untuk mengimbangi ketersediaan lapangan pekerjaan dalam mengatasi krisis tenaga kerja dalam negeri.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Perspektif Kebijakan Immigrasi Max Weber

Max Weber mengkategorisasikan kebijakan immigrasi ke dalam tiga perspekftif utama yaitu (1). Perspektif Utilitarian Ekonomi, (2). Perspektif Hak Liberalisme dan (3). Perspektif Komunitas Tradisional (Skrentny, 2013).

A. Perspektif Utilitarian Ekonomi

Perspektif ini menekankan bahwa kesejahteraan ekonomi di dasarkan pada sistem etika yang disebut dengan Utilitarianisme (Morey, 2018). Ekonomi Utilitarianisme menegaskan bahwa suatu kebijakan harus diarahkan pada pertumbuhan ekonomi agar memberikan kesejahteraan bagi semua orang. Perspektif ini muncul dalam dua mode yaitu : (1) Orientasi pemaksimalan keuntungan dimana tenaga kerja asing terampil didatangkan lebih banyak dan fleksibel serta perbatasan semakin terbuka. Mode ini biasanya banyak ditemukan pada kebijakan imigrasi di Barat (Eropa dan Amerika Serikat). (2) Orientasi pada potensi biaya imigrasi dan menekankan kebijakan pengakuan hanya pada pekerja yang dibutuhkan pengusaha. Negara kemudian akan mengeluarkan kebijakan meminimalisir pengeluaran untuk pekerja yang menganggur dan tanggungan untuk pengangguran. Mode ke dua ini sering diamati di Asia Timur. Kedua mode ini memiliki tujuan yang sama yaitu: imigrasi sebagai cara memenuhi kebutuhan ekonomi (khususnya kebutuhan pengusaha) (Skrentny, 2013).

B. Perspektif Liberalisme Hak

Perspektif ini menekankan bahwa migran dan warga negara merupakan individu yang memiliki hak (pentingnya individu). Perspektif ini mendorong agar perbatasan lebih terbuka tanpa terlalu memfokuskan pada manfaat ekonomi. Sama halnya dengan perspektif Utilitarian Ekonomi, Liberalisme Hak terdiri dari dua mode yaitu: (1) Fokus pada imigran dimana hak-hak yang lebih ditekankan adalah Hak Asasi Manusia atau hak yang telah tercantum dalam kontitusi tentang pentingnya martabat dan kesejahteraan kehidupan. Mode ini lebih umum ditemukan di Barat (Eropa). (2) Fokus pada hak-hak warga negara tuan rumah. Mode pada kebijakan ini mempertimbangkan ekonomi warga negara dan memastikan bahwa pendapatan semua warga negaranya tidak dipengaruhi oleh arus imigran (Skrentny, 2013).

C. Perspektif Komunitas Tradisional

Perspektif ini menekankan pada kepentingan kolektif yang termasuk di dalamnya adalah melindungi budaya, tatanan sosial, hubungan sosial dan supremasi hukum dari perubahan yang terjadi oleh akibat adanya aktivitas imigrasi. Perspektif ini juga menekankan kebijakan ke arah pembatasan dan pengecualian aktivitas imigrasi serta mendorong asimilasi budaya imigran. Kebijakan yang di hasilkan dari persepktif ini kadang dinilai rasis (Skrentny, 2013).

Jepang membatasi penerimaan suaka sebagai pekerja asing dikarenakan Jepang mempertimbangkan biaya imigrasi seperti akomodasi pekerja asing (The Guardian, 2018). Kemudian Perspektif Liberalisme Hak mode kedua untuk menjelaskan mengapa Jepang membatasi penerimaan suaka asing. Shinzo Abe sebagai pemerintah tertinggi Jepang menegaskan bahwa ia harus

menanggulangi masalah domestik seperti krisis angka kelahiran dan meningkatkan pertisipasi perempuan di pasar tenaga kerja Jepang sebelum Jepang dapat menerima pencari suaka (Sari, 2015). Artinya Jepang harus mendahulukan warga negaranya sebelum para imigran. Serta yang terakhir adalah Perspektif Komunitas Tradisional dimana Jepang membatasi penerima suaka karena warga jepang yang homogen. Masyarakat Jepang yang homogen berarti mereka tidak memiliki motivasi untuk menerima perubahan (Chan, 2018). Apabila Jepang menerima para pemohon suaka tentu akan memengaruhi homogenitas masyarakat Jepang.

2. Rational Choice Theory

Kebijakan luar negeri merupakan suatu kebijakan yang tentu tidak sembarang dibuat oleh para pengambil kebijakan di dalam suatu negara karena kebijakan luar negeri akan sangat berpengaruh terhadap masa depan suatu negara. Suatu kebijakan luar negeri akan dibuat melalui proses kalkulasi perhitungan untung rugi yang sangat panjang dan proses analisis yang dalam dengan melibatkan data dan fakta yang ada serta posisi negara tersebut di mata internasional saat ini. Kepetingan nasional menjadi satu-satunya tujuan utama negara dalam mengeluarkan sebuah kebijakan luar negeri. Suatu negara akan mempertimbangkan apa yang akan didapat atau *feedback* bila kebijakan luar negeri tersebut dibuat (Kesuma, 2018).

Sejauh ini, ilmuan politik belum menemukan definisi konsensus tentang kebijakan luar negeri dikarenakan setiap definisi yang telah dipaparkan sebelumnya oleh para ahli tergantung pada konteks dan pada situasi apa sebuah kebijakan itu dilaksanakan. Bisa saja apa yang dianggap sebagai kebijakan luar negeri hari ini belum tentu menjadi kebijakan luar negeri di kemudian hari meski kasusnya sama. Namun, terdapat definisi luas mengenai kebijakan luar negeri yaitu seperangkat aturan atau tindakan yang mengatur perilaku dan tindakan otoritas politik independen (entitas yang berdaulat) yang digunakan di dunia internasional (Morin & Paquin, 2018). Jack C. Plano dan Roy Olton dalam buku *The International Relation Dictionary* mengatakan bahwa politik luar negeri atau kebijakan luar negeri merupakan sebuah strategi ataupun tindakan terencana, strategis, dinamis dan sistematis yang dikembangkan oleh para pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan spesifik yaitu berkaitan dengan kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri bisa berupa inisitaif dari para pembuat kebijakan dalam suatu negara maupun sebagai reaksi terhadap kebijakan luar negeri negara lainnya (Plano & Olton, 1988).

Shinzo Abe sebagai pemerintah sekaligus aktor utama dalam pengambilan keputusan harus bertindak sebagai aktor rasional dimana seorang aktor rasional dalam proses pembuatan kebijakan akan dihadapkan dengan pilihan kebijakan-kebijakan alternatif. Setiap pilihan alternatif selalu diikuti dengan konsekuensi dan aktor rasional akan memilih kebijakan dengan hasil atau keuntungan tertinggi untuk kepentingan nasional negaranya (Allison G. T., 1971).

IV. PEMBAHASAN

Alasan pemerintah Jepnag membatasi jumlah penerimaan pencari suaka sebagai pekerja imigran meski Jepang tengah dilanda krisis kerkurangan tenaga kerja domestik dapat ditinjau dan dianalisis dari berbagai alasan yaitu ekonomi, sosial budaya dan keamanan nasional.

A. Pertimbangan Ekonomi

Menurut perspektif utilitarianisme ekonomi kebijakan imigrasi Max Webber, kebijakan imigrasi harus diarahkan pada pertumbuhan ekonomi. Utilitarian berasal dari bahasa latin *Utilis*, yang memiliki arti bermanfaat, berguna, mengutungkan, dan

berfaedah. Utilitaran berarti orang-orang yang menganut paham Utilitarianisme. Utilitarianisme sendiri merupakan ideologi yang secara etika normatif merupakan suatu tindakan yang memaksimalkan penggunaan (utility) (Mangunhardjana, 1997). Dalam ilmu ekonomi, Utilitarianisme ditegaskan kebijakan yang mengarahkan pada pertumbuhan ekonomi agar memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Salah satu mode Ekonomi Utilitarianisme yang diterapkan oleh Jepang dalam kebijakan imigrasi baik pengungsi dan pencari suaka adalah orientasi pada potensi biaya imigrasi (Skrentny, 2013).

Kegiatan imigrasi memang berpotensi mengeluarkan biaya yang tidak sedikit terlebih lagi bagi negara tujuan para imigran atau *resettlement country* seperti Jepang. Beberapa imigran, khususnya imigran yang berasal dari daerah konflik bahkan tidak hanya datang dengan keluarga inti saja melainkan membawa seluruh anggota keluarga. Negara penerima seperti Jepang juga berkewajiban dalam mengakomodasi para pengungsi seperti menyediakan tempa tinggal yang layak, menyediakan konsumsi, dan biaya lainnya. Itulah mengapa Jepang sebelumnya pada tahun 2010-2018 memiliki kebijakan memberikan izin kerja bagi para pencari suaka yang permohonannya telah diterima sebelum mereka mendapat status pengungsi. Sistem pemberian izin kerja selama 6 bulan setelah pengajuan status pengungsi bagi pencari suaka tersebut dimaksudkan untuk memberikan keringanan bagi pengungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup selama status pengungsinya belum dikabulkan (The Guardian, 2017).

Saat ini kebijakan imigrasi Jepang mengharuskan pengungsi memiliki Undang-Undang yang mengharuskan para pengungsi datang dengan membawa visa kemudian para pengungsi harus menunggu beberapa saat sebelum diberikan status pengungsi (Chan, 2018). Pada masa tersebut banyak pencari suaka yang tiba di Jepang dalam keadaan menganggur, kelaparan dan tanpa bekal terlebih lagi bagi pencari suaka yang datang dari negara konflik. Sistem pemberian izin kerja yang sudah tidak diberlakukan menyebabkan Jepang terpaksa harus mengeluarkan biaya imigrasi jika tidak membatasi jumlah penerimaan pencari suaka. Biaya imigrasi tentu tidak sedikit mengingat pertahunnya Jepang didatangi oleh puluhan ribu pencari suaka dari berbagai negara yang tentunya tidak semua memiliki keterampilan. Sehingga apabila Jepang menerima pencari suaka dalam jumlah yang banyak, Jepang harus menyediakan lapangan pekerjaan setelah 6 bulan mereka mengajukan status pengungsi baik bagi pencari suaka termapil maupun tidak terampil. Tentu hal ini akan merugikan Jepang dimana Jepang dalam segi biaya karena harus menyediakan akomodasi bagi para pencari suaka (The Guardian, 2017).

Jepang akan meminimalisir pengeluaran untuk pencari suaka yang menganggur dan tanggungan bagi pencari suaka yang masih menganggur (Skrentny, 2013). Terlebih lagi apabila para pencari suaka tersebut terdiri dari satu keluarga. Itulah sebabnya mengapa kebijakan revisi terbaru Jepang mengenai kontrol imigrasi tidak memberikan izin bagi para pekerja imigran yang tidak terampil membawa serta keluarga mereka menetap di Jepang (Obe M. , 2019). Mengingat biaya hidup di Jepang yang cukup tinggi serta beberapa biaya sosial yang harus dipenuhi oleh para imigran. Pertumbuhan pesat ekonomi Jepang memang menghasilkan permintaan tenaga kerja. Permintaan melampaui kemampuan tenaga kerja dalam memproduksi barang dan jasa. Kondisi ini memang menghasilkan upah yang lebih tinggi dan membatu menyamakan distribusi pendapatan. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa negara dengan pertumbuhan ekonomi pesat cenderung memiliki standar hidup dan biaya hidup yang tinggi (Morley, 1998). Begitu juga yang terjadi di Jepang saat ini. Standar hidup rata-rata di Jepang termasuk

tertinggi di dunia (Meadway, 2010). Biaya hidup yang tinggi membuat masyarakat Jepang cenderung gila bekerja.

Selain itu, Jepang juga melindungi ekonomi warga negaranya sendiri dimana Jepang harus mengutamakan kepentingan dan hak masyarakat Jepang terlebih dahulu. Pada dasarnya baik warga negara tuan rumah maupun para imigran merupakan individu yang memiliki hak. Perspektif ini dapat dijelaskan pada perspektif Liberalisme Hak (hak individu) dalam perspektif kebijakan imigrasi Max Weber. Untuk kasus pembatasan penerimaan pencari suaka sebagi pekerja imigran yang saat ini terjadi di Jepang, perspketif hak individu lebih di tekankan pada mode hak-hak warga negara tuan rumah dimana ekonomi, pendapatan dan kesejahteraan warga negara tidak dipengaruhi oleh orang asing, bukan Hak Asasi Manusia secara universal (Skrentny, 2013). Jepang memang menyatakan diri sebagai negara yang membutuhkan pekerja asing sebagai upaya dalam mengatasi fenomena kekurangan tenaga kerja akibat Aging Society. Namun, seperti negara-negaar lain, Jepang harus mengutamakan warga negaranya. Itulah sebabnya mengapa meski kekurangan tenaga kerja, Jepang terus mengupayakan bahwa seluruh warga negaranya memiliki pekerjaan. Termasuk ibu rumah tangga dan para manula yang telah pensiun di dorong untuk bekerja meski hanya pekerjaan paruh waktu (Mainichi Japan, 2017).

Jika melihat kembali kondisi demografis Jepang yang semakin menua jelas menjadikan Jepang mengalami kerugian ekonomi karena harus mengeluarkan tunjangan sosial yang sangat besar bagi populasi lanjut usia. Jika Jepang mampu merancang kebijakan imigrasi yang memadai justru dapat menghasilkan peningkatan ekonomi melalui peningkatan tenaga kerja imigran yang dapat mengisi beberapa sektor ekonomi yang saat ini banyak membutuhkan tenaga kerja. Akan tetapi setiap solusi revolusioner yang ditawarkan terhadap Jepang tampaknya membutuhkan waktu yang panjang untuk menginplementasikannya. Pasalnya pemerintah Jepang tetap mengklaim bahwa penerimaan pencari suaka sebagai pekerja imigran setiap tahunnya menyesuaikan dnegan kebutuhan negara (Glowgoski, 2018). Padahal perusahaan di Jepang menurut survey Bank of Japan mengaku kekurangan tenaga kerja dan membutuhkan tenaga kerja asing untuk menunjak aktifitas dan produktifitas perusahaan mereka (Japan Broadcasting Corporation, 2017).

Jumlah aktifitas imigasi yang cukup tinggi dengan sendirinya dapat menyebabkan beberapa kerugian seperti terdapatnya tekanan pada kondisi jumlah transportasi dan jumlah perumahaan. Keduanya dapat mengurangi kapasitas rute transportasi dan menjadikan laju transportasi menjadi lebih tidak efisien karena permintaan akan transportasi lebih besar. Selain itu, jumlah pendatang asing yang cukup tinggi akan berpengaruh terhadap meningkatnya biaya sewa dan penjalan serta keterbatasan lahan hunian. Meski demikian, manfaat ekonomi yang didapatkan oleh Jepang dengan adanya arus imigrasi yang masuk ke Jepang sebenarnya akan jauh lebih menguntungkan dibandingkan ketakutan dan kekhawatiran Jepang saat ini. Arus imigrasi dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Orang asing yang berada di Jepang dapat meningkatkan produksi sekaligus sebagai pangsa pasar artinya untuk tujuan jangka pendek, Jepang dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto sambil meningkatkan inflasi. Sedangkan untuk tujuan langsung ialah Jepang dapat meningkatkan permintaan barang yang dikontribusikan oleh orang asing. (Glowgoski, 2018).

B. Pertimbangan Sosial Budaya

Terlepas dari kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial juga menjadi

pertimbangan. Jepang terkenal dengan perilaku sosial masyarakat serta budayanya yang khas. Alasan Jepang membatasi penerimaan pencari suaka dapat dijelaskan dengan perspektif Komunitas Tradisional Max Webber. Dijelaskan bahwa alasan pemerintah Jepang dalam membatasi penerimaan pencari suaka karena menekankan pada kepentingan masyarakat secara kolektif termasuk didalamnya melindungi budaya, tatanan sosial, hubungan sosial dan supremasi hukum yang suatu saat dapat berubah akibat adanya aktivitas imigrasi (Skrentny, 2013). Jawaban dari kebijakan selektif Jepang dalam menerima orang asing baik sebagai pengungsi maupun sebagai pekerja imigran terletak pada ciri khas konteks kehidupan masyarakat dan karakteristik Jepang. Masyarakat Jepang merupakan masyarakat homogen yang mempertahankan persepsi kuat tentang homogenitas etnis dan budaya (Green, 2017).Homogenitas merupakan mitos khas yang telah dibudidayakan pada *Nikkeijin* (etnis Jepang) sejak zaman kuno hingga sekarang. Homogenitas jugalah yang berkontribusi pada isolasionisme yang telah dilakukan Jepang selama beratus tahun lamanya. Nasionalisme budaya dan identitas yang didasarkan "satu bahasa, satu ras" telah tumbuh sangat kuat. Meski kini Jepang terlibat dalam arus globalisasi dan sudah tidak terisolasi, namun identitas tersebut tidak mengalami perubahan (Brody, 2002).

Identitas masyarakat Jepang diserap dari nama Jepang dalam bahasa Jepang yaitu *Nippon* atau *Nihon* yang diambil dari dua karakter bahasa Jepang yaitu 日本 (dibaca Nihon atau Nippon). 日 "nichi" memiliki arti "matahari" dan 本 "hon" yang memiliki arti "asal". Nippon atau Nihon secara harfiah memiliki makna "asal-usul matahari" yang kemudian sampai saat ini Jepang memiliki julukan sebagai negara matahari terbit (Piggott, 1997). Jepang memiliki gelar "Dai Nippon Teikoku" yang berrati "The Empire of Great Japan". Gelar ini dipakai dari Restorasi Meiji hingga akhir Perang Dunia II. Dari akhir Perang Dunia II, sebutan untuk negara Jepang berubah yaitu "Nihon-koku/Nippon-koku" yang berarti "Negara Jepang". sebutan tersebut sekaligus sebagai sebutan Jepang zaman modern (Frédéric, 2002).

Dedikasi masyarakat Jepang yang berpusat pada kekuatan kaisar menjadikan citra Jepang juga kuat. Identitas Nasional masyarakat Jepang atau "Nihonjin" yang berarti orang Jepang pertama kali muncul pada tahun 1587. Pada tahun 1855 "Nihonjin" digunakan sebagai kata yang mewakili masyarakat Jepang dalam perjanjian perdagangan antara Jepang dan Belanda. Di bawah kekaisaran Edo, masyarakat Jepang hidup tanpa rasa identitas karena konsep "Orang Jepang" yang ada pada saat itu digunakan untuk mewakili seluruh orang yang tinggal di Jepang. Kemudian pada periode Meiji, para intelektual mulai mempertanyakan apa itu "Nihonjin" yang kemudian terjawab saat Perang Sino-Jepang. Tahun 1889, surat kabar nasional Katsunan Kuga menerbitkan rumusan gagasan Japanisme berisi karakter nasional baru Jepang yang berpusat pada kesetiaan kepada kaisar (Tsujiuchi, 1996). Selain itu terdapat juga istilah "Nihonjinron" merupakan istilah yang digunakan pada sebuah tulisan yang mengangkat tentang keunikan kebudayaan Jepang. Istilah ini bahkan dianggap sebagai perwakilan dari semua pemikiran masyarakat Jepang. Nihonjinron terdiri dari dua pemahaman dasar yaitu : (a) masyarakat Jepang adalah masyarakat dengan 'keunikan' yang unik, artinya makna keunikan yang dimiliki Jepang lebih dalam. Seperti misalnya berkenaan dengan kepribadian, etos kerja, sifat hemat, tepat waktu, dan jiwa nasionalis. (b) Orientasi masyarakat Jepang adalah loyalitas pada kelompok. Orientasi dan loyalitas pada kelompok inilah yang selanjutnya membentuk pola kebudayaan dominan serta membentuk karakteristik orang Jepang (Burgees, 2007).

Dari pemahaman dasar

Nihonjinron tersebut terbentuk premis utama dimana masyarakat Jepang adalah masyarakat homogen. Homogen dalam lingkungan sosial berarti perilaku sosial yang membentuk sebuah bangsa yang secara bahasa, ras, budaya, dan agama sama. Meski setelahnya banyak narasi "Jepang sebagai negara Multikultural" muncul yang bertujuan untuk menentang pandangan bahwa masyarakat Jepang sebagai masyarakat monokultur, namun Jepang sampai saat ini tidak dapat menyembunyikan karakter masyarakatnya yang homogen (Burgees, 2007). Loyalitas Jepang terhadap kaisar dan identitas nasional yang dijaga menjadikan masyarakat Jepang memiliki kontak yang sangat terbatas dengan orang asing, termasuk para pengungsi di negara mereka. Sebagian masyarakat Jepang yang menentang para imigran masuk dan bermukim di Jepang yang mana para pengungsi dapat lebih dekat dengan komunitas masyarakat Jepang. Hal ini juga memicu orang Jepang cenderung memiliki sentimen dan prasangka negatif terhadap imigran dan menunjukkan bahwa xenophobia telah tumbuh di Jepang (Yasaku & Yoshikuni, 2018). Rasa takut, khawatir dan prasangka negatif tersebut tidak hanya menyerang masyarakat tetapi juga politisi Jepang. Shintaro Ishihira yang merupakan politisi sekaligus pernah menjabat sebagai gubernur Tokyo memiliki ketakutan yang meluas atas kejatahan orang asing di Jepang. Ishihira menyuarakan sentiment anti orang asing terutama Tiongkok, yang mana pernah mengeluarkan pernyataannya tentang orang asing yang dapat merusak moral dan gangguan sosial. Masyarakat Jepang memang memiliki kebanggaan terhadap identitas nasionalnya yang mana budaya semangat, inovasi dan orang-orang yang ramah menjadi identitas utama yang tertanam pada karakteristik orang Jepang. Alasan inilah yang digunakan Jepang untuk mengamankan dirinya dari asimilasi budaya asing apabila imigrasi dan penerimaan suaka dilakukan. Hal ini dapat merubah pandangan dunia tentang karakteristik Jepang tersebut. Ada banyak yang bisa dibanggakan dari Jepang, namun beberapa opini mengatakan bahwa homogenitas etnis seharusnya bukanlah hal yang harus berada dalam daftar yang dibanggakan (Wohns, 2013).

Lingkungan budaya Jepang memunculkan beberapa persepsi: (1) persepsi bahwa orang asing yang sekalipun telah menetap di Jepang atau telah memiliki kewarganegaraan Jepang baik karena pernikahan tetap dianggap sebagai 'orang lain'. perseprsi tersebut terbentuk dalam keyakinan bahwa orang-orang pribumi Jepang tidak hanya memiliki keyakinan akan keunggulan budaya tetapi juga keunggulan biologis. Bahkan orang Jepang mengklaim bahwa mereka memiliki identitas biologis dan psikologis yang unik dan terpisah dari komunitas masyarakat global lainnya yang ada di dunia ini. Klaim ini menjadi dasar bahwa masyarakat Jepang merupakan masyarakat yang bangga terhadap homogenitas mereka. (2) Persepsi identitas biologis dan etno-kultural tersebut menjadikan orang Jepang sangat percaya terhadap budaya, etnis dan bahasa yang mereka gunakan merupakan etnis, budaya dan bahasa superioritas atas bangsa lainnya. (3) persepsi ketiga ialah bahwa ras unik dan etno-kultural merupakan homogeny murni yang diangkat atas bangsa lainnya. Saat ini di Jepang terdapat kelompok masyarakat yang dianggap sebagai kelompok minoritas internal yaitu Zanichi Korea, Suku Ainu di Okinawa, dan kelas Burakumin (Sıddıkoğlu, 2017).

Masyarakat Jepang memang bangga terhadap homogenitas mereka. Hal ini terbukti dari beberapa pernyataan dan pandangan para politisinya. Nakasone, Perdana Menteri Jepang tahun 1986, mengatakan bahwa Jepang mampu memiliki standar pendidikan yang tinggi karena tidak lepas dari kehomogenan rasnya. Nakasone bahkan membandingkan dengan Amerika Serikat dimana keberadaan para imigran dari Amrika

Latin dan Afrika menjadikan standar pendidikan Amerika Serikta lebih rendah daripada Jepang. Kemudian tahun 2005, Aso Taro, Menteri Luar Negeri Jepang menyatakan bahwa Jepang merupakan satu negara dengan satu peradaban yang memiliki satu budaya dan ras. Dua tahun kemudian, tepatnya bulan Februari 2007, Ibuki Bunmei, Menteri Pendidikan Jepang memuji homogenitas rasial Jepang. Pandangan dan pernyataan para politisi Jepang tersebut seolah mengagungkan homogenitas. Perwujudan paling nyata bahwa Jepang sangat mengagungkan identitas nasional terutama bahasa adalah pada sebagian besar literasi, bahasa buku pedoman dan petunjuk, serta papan petunjuk publik menggunakan bahasa Jepang dan jarang menyediakan terjemahaan ke dalam bahasa lain (Burgees, 2007).

Jepang memang memiliki budaya nasional yang kuat. Jika Jepang mengikuti negara Barat dan berubah menjadi masyarakat multikultural, maka berpotensi pada konflik sosial, politik dan meningkatnya risiko geopolitik. Paul Collier, Profesor Universitas Oxford menyatakan bahwa semakin banyak imigran yang masuk ke suatu negara atau kelompok etnis maka di masa depan komunitas imigran akan menyatu dengan komunitas tuan rumah dan menggantikan generasi tuan rumah. Jika imigran di Jepang tumbuh dengan subur melebihi populasi pribumi, maka para imigran berpotensi merebut generasi pribumi Jepang. Upaya membatasi penerimaan pencari suaka sebagai pekerja imigran di Jepang adalah sebagai upaya dalam mempertahankan komunitas tradisional masyarakat Jepang (Tasker, 2018). Masuknya pengungsi ke Jepang baik sebagai pekerja imigran maupun pengungsi politik berupa asylum seeker merupakan tantangan politik eksternal pemerintah Jepang (Sıddıkoğlu, 2017).

Aktifitas imigrasi secara inheren memang membawa perbedaan di lingkungan baru para imigran. Mayoritas orang Jepang memusuhi imigrasi terutama jika difokuskan pada kriminalisasi yang dilakukan para pengungsi. Orang Jepang yang cenderung Xenophobia memiliki dukungan yang lebih rendah terhadap asimilasi. Bagaimana sikap masyarakat tuan rumah dalam menerima pendatang baru sepenuhnya dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap asimilasi. Bagi masyarakat Jepang yang cenderung Xenophobia, mereka mengangap bahwa orang asing yang bertindak seperti orang Jepang (asimilasi) akan dianggap merendahkan dan melanggar kepercayaan mereka pada keunikan dan kekhasan Jepang (Richey, 2010). Imigrasi sebagai solusi yang ditawarkan Barat atas fenomena demografi Aging Society di Jepang tampaknya bukan solusi yang relevan diterapkan di tengah masyarakat homogen. Negara Barat seperti Amerika dan Bangsa Eropa tidak pernah menjadi negara yang secara etnis homogen sehingga masyarakatnya terbiasa hidup dengan para imigran. Meski secara geografis Inggris dan Jepang memiliki kesamaan sebagai negara kepulauan, namun Inggris bukanlah masyarakat homogen. Fakta ini yang menjadi dasar paling kuat mengapa mayoritas masyarakat Jepang menentang aktifitas imigrasi (Wohns, 2013).

Meski kebijakan membuka perbatasan bagi para imigran dan pencari suaka dianggap sebagai solusi yang potensial yang ditawarkan Amerika Serikat, sebagai salah satu negara yang terbuka terhadap pendatang, Amerika Serikat pernah memiliki pengalaman kepanikan akibat imigrasi pada akhir abad ke 19. Bukan karena khawatir lapangan pekerjaan akan semakin sulit, namun kehadiran orang-orang Yahudi, Italia, Slavia, dan Irlandia dianggap akan mengubah ras Amerika. Selanjutnya kebijakan yang dilakukan adalah eugenika paksa, lisensi perkawinan, plot pembasmi terhadap orang kulit hitam. Meski dianggap melanggar Hak Asasi Manusi,

namun kebijakan tersebut dibenarkan atas nama mewujudkan homogenitas (Tucker, 2017). Sebagian masyarakat Jepang mungkin mendukung penerimaan dan pemukiman kembali para pengungsi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengungsi akan mengancam keselamatan publik dan konflik budaya bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Orang asing memang dianggap sebagai ancaman serius terhadap masyarakat, keselamatan publik, politik, dan warisan budaya dalam masyarakat homogen seperti Jepang. Masyarakat negara yang relatif homogen dan kontak yang terbatas dengan orang asing rentan terserang syndrom "Not In My Back Yard" dimana mereka memiliki keyakinan yang kuat untuk menentang orang asing masuk ke negara mereka. Mereka juga rentan terhadap ancaman yang bahkan hanya berupa laporan dari media yang menggambarkan ancaman pengungsi yang terjadi di negara lain dapat menimbulkan rasa takut (Yasaku & Yoshikuni, 2018). Kegelisahan dan ketakutan global akibat laporan media tentang kekejaman teroris, penyebaran wabah penyakit, dan penyebaran senjata menjadikan sikap negara-negara terhadap kebijakan kontrol imigrasi semakin ketat serta lebih jauh lagi munculnya fenomena anti-imigran di berbagai negara (Burgees, 2007).

Setimen masyarakat Jepang terhadap imigran juga menjadi perhatian pemerintah. Menurut jajak pendapat yang dilaporkan oleh Asahi Shimbun tahun 2013, 65% masyarakat Jepang menentang peningkatan imigrasi dan 26% mendukung. Pemerintah Jepang khawatir jika menerima pencari suaka sebagai pekerja asing dan melonggarkan kebijakan imigrasi maka dikhawatirkan jumlah imigran yang masuk akan lebih besar dari yang dapat diserap jepang dengan aman dan nyaman bagi masyarakat Jepang (Wohns, 2013). Para imigran juga secara tidak langsung akan mencari terobosan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi sehingga para imigran tersebutlah yang akan menikmati keuntungan lebih lama daripada masyarakat pribumi Jepang (Harner, 2015). Pemerintah Jepang tentu khawatir jika warga negara Jepang justru sepenuhnya tidak dapat menikmati keuntungan dari ekonomi dan teknologi Jepang.

Kondisi Jepang saat ini dapat digambarkan seperti pernyataan Samuel Francis, penulis Amerika (1947-2005) "Anda harus memiliki homogenitas agar masyarakat tertib dan beroperasi dengan baik. Tanpa itu, Anda bisa melupakan hak dan kebebasan". Pernyataan tersebut justru cenderung mengarah ke Rasisme dan Xenophobia dimana Jepang juga memiliki kecenderungan sebagai masyarakat yang Rasis dan Xenophobia. Namun Jeffrey A Tucker, ekononom dan penulis Amerika, membantah bahwa homogenitas adalah solusi yang ditawarkan ketika ada masalah dengan heterogenitas, bahkan kebebasan bukanlah hasil dari homogenitas. Tucker juga menyatakan bahwa tatanan masyarakat homogen dan terisolasi cenderung miskin dengan mengambil contoh suku-suku kecil di pedalaman Amazon. Namun teori Tucker yang satu ini tidak dapat dibuktikan untuk kasus Jepang (Tucker, 2017).

Pertimbangan sosial budaya dalam penerimaan pencari suaka sebagai pekerja imigran yang masuk ke Jepang juga terkait aspek ekonomi. Jepang mampu melampaui Produk Domestik Bruto negara-negara maju di dunia bahkan setara dengan 253 persen dari produk domestik dunia pada tahun 2017 yang diklaim berkat mempertahankan homogenitas tersebut. Namun beberapa pakar juga berpendapat bahwa keinginan kuat Jepang dalam mempertahankan masyarakat homogen secara etnis akan menimbulkan biaya yang lebih tinggi (Glowgoski, 2018).

C. Pertimbangan Kepentingan Nasional

Hubungan antara imigran asing dan keamanan nasional memang sangat erat.

Sentimen masyarakat tentang perbedaan kewarganegaraan, ras, suku, agama dan budaya menjadikan orang-orang sulit menerima perubahan. Seiring dengan populasi imigran asing meningkat, kebijakan negara dalam membatasi pengungsi juga semakin kejam dan menyulitkan. Tindakan tersebut dilakukan bukan tanpa alasan melainkan kekhawatiran bahwa orang asing akan berdampak pada keamanan nasional, identitas nasional bahkan bahkan untuk kasus negara seperti Jepang, orang asing dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap homogenitas masyarakat Jepang (Reynolds, 2018). Homogenitas masyarakat Jepang menjadikan mereka memiliki keyakinan yang berbeda tentang asimilasi yang mana dapat memengaruhi sikap terhadap imigrasi. Sentimen anti-imigran Jepang cukup tinggi bahkan terkesan Xenophobia (Anti orang asing) (Richey, 2010).

Kepentingan Nasional merupakan konsep abstrak yang tidak memiliki definisi yang pasti. Namun Morgenthau menyatakan bahwa konsep kepentingan nasional terdiri dari kesejahteraan umum, dan hak perlindungan hukum sama seperti nilai dalam konsep umum konstitusi Amerika Serikat. Selanjutnya Morgenthau menjelaskan bahwa kepentingan nasional merupakan upaya minimum suatu negara dalam melindungi identitas fisik, politik, dan kulural. Negara harus mampu menjaga integritas teritorial, rezim ekonomi-politik, serta norma-norma, etnis, religius, sejarah dan linguistik (Mas'oed, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi, 1994). Sebagai salah satu negara yang berdaulat dan memiliki kepentingan nasional, segala bentuk kebijakan luar negeri yang dikeluarkan Jepang merupakan perwujudan dari cara Jepang menjaga kepentingan nasionalnya.

Kekhawatiran lain yang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat Jepang adalah kejahatan publik. Terlebih lagi kejahatan yang dilakukan oleh orang asing dianggap sebagai ancaman terhadap kesejahteraan dan keamanan publik. Survei yang dilakukan oleh Kantor Kabinet tahun 2006 melaporkan bahwa 84,3% responden menganggap keamanan publik Jepang memburuk dalam kurun waktu 10 tahun terakhir seiring dengan masuknya imigran dari berbagai negara. 55,1% dari responden menganggap bahwa memburuknya keamanan publik disebabkan oleh meningkatkan kejahatan yang dilakukan oleh orang asing yang mengunjungi ataupun tinggal di Jepang. Untuk menjaga kesejahteraan publik, Pemerintah Jepang juga mengeluarkan kebijakan dimana orang asing non-Jepang dibatasi menduduki posisi manajerial dalam pekerjaan (Burgees, 2007). Dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya Jepang dalam membatasi arus imigrasi terutama pencari suaka sebagai pekerja asing merupakan upaya Jepang dalam melindungi kepentingan nasional terutama warga negaranya.

Sikap publik tentang imigran berubah setelah terjadinya serangan kantor World Trade Center dan gedung Pentagon pada 11 September 2001 terutama warga negara Amerika Serikat. Setelah kejadian tersebut, masyarakat Amerika Serikat mengkhawatirkan keamanan mereka dan mendukung penuh kebijakan pembatasan imigrasi (Michaelidis & Lindsay, 2003). Sentimen anti imigran ini tidak hanya tumbuh di Amerika, Jepang sebagai salah satu negara maju yang menjadi tujuan dari pencari suaka juga menjadi salah satu negara yang sangat tidak ramah terhadap pengungsi. Hal tersebut tidak lepas dari sejarah Jepang pada periode Edo. Tumbuh di bawah kebijakan isolasionis selama lebih dari 200 tahun sampai pada tahun 1853 dimana orang asing diusir dan kontak asing dilarang. Kekhawatiran dan rasa takut akan orang asing tersebut kemudian muncul kembali pada tahun 1980 dimana saat itu Jepang setiap harinya didatangi oleh 10.000 orang dengan perahu yang berasal dari Vietnam. Tidak hanya sampai di situ, kekhawatiran paling kontemporer yang dialami Jepang adalah datangnya

imigran dari Korea Utara. Ketakutan yang dialami Jepang secara terus menerus adalah program pengungsi lebih liberal yang mengharuskan Jepang menerima gelombang pengungsi yang melarikan diri dari Korea Utara (Chan, 2018).

Ancaman keamanan nasional Jepang saat ini memang bukan lagi ekspansionisme dari Cina, Rusia, ataupun rudal Korea Utara. Serangan Imigran menjadi ancaman keamanan Jepang saat ini. meski imigrasi dan penerimaan pencari suaka diangap sebagai alternatif terbaik dalam mengatasi populasi yang semain menua, namun bagi Jepang membuka diri untuk imigrasi dan pencari suaka akan menjadi masalah besar (Harner, 2015). Jepang memang memiliki catatan positif tentang perannya dalam menanggulangi kejahatan transnasional salah satunya *Human Trafficking* (perdagangan manusia) dan *Sex Trafficking* (perdagangan sex). Capaian Jepang untuk laporan tahunan mengenai perdagangan manusia (seks anak dan pekerja paksa) dan penghapusan perdagangan manusia berada pada posisi pertama dunia meski banyak diduga kasus perdagangan manusia ditangani dengan hukum administratif. Hukum tersebut dianggap terlalu rendah mengingat Jepang tidak memiliki Undang-Undang anti perdagangan manusia yang komprehensif degan standar Undang-Undang internasional mengenai perdagangan manusia (United States Department of State, 2018). Jepang telah belajar banyak selama bertahun-tahun dari pengalaman negara-negara yang ramah dengan imigran seperti Eropa dan Australia dalam kebijakan imigrasi. Negara-negara di Eropa seperti Inggris, Italia dan negara-negara Skandinavia dan Australia harus mengerahkan kapal perang angkatan laut yang berpatroli untuk disepanjang perairan yang berpotensi sebagai celah masuk imigran melalui perahu. Selain itu, Inggris juga memiliki catatan informasi tentang potensi ancaman teroris akibat keterbukaan imigrasi (Tasker, 2018).

Meski keadaan nasional Jepang dianggap cukup aman, namun Jepang memiliki masalah dengan kejahatan transnasional seperti terorisme yang datang dari pihak asing. Aum Shinrikyo atau AUM merupakan organisasi keagamaan yang telah ditetapkan sebagai Organisasi Teroris Asing dimana organisasi ini kerap melakukan serangan masal menggunakan gas kimia mematikan sarin di tahun 1994 dan 1995 yang menjatuhkan korban sebanyak 6.520 jiwa (United States Department of State, 2018). Negara maju seperti Jepang masih enggan menerima pengungsi untuk *Resettlement* (pemukiman kembali) dikarenakan kebijakan yang membatasi tersebut dikaitkan dengan sentimen anti pengungsi publik Jepang yang dikarenakan ketakutan akan ancaman keamnan nasional seperti serangan terorisme. Sentimen publik kemudian semakin meningkat karena adanya tokoh elit politik anti pengungsi, Presiden Amerikan Serikat, Donald Trump menandatangai kebijakan kontroversial *"Protect the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States"* pada tanggal 27 Januari 2017. Kebijakan ini kemudian mendorong *"Travel Ban"* dan *"Muslim Ban"* yang melarang warga Amerika berpergian ke beberapa negara Timur Tengah dan melarang pendatang masuk ke Amerika dari beberapa negara Timur Tengah yang di *"Ban"* Amerika Serikat (Yasaku & Yoshikuni, 2018). Tindakan Jepang yang juga membatasi pengungsi ini memicu beberapa opini publik bahwa pemerintah Jepang yang masih dibawah kontrol Amerika Serikat dihubungkan dengan doktrin presiden Donald Trump dalam membuat kebijakan mengenai pembatasan pengungsi dan memperketat arus imigrasi yang masuk ataukah Jepang membatasi pengungsi murni dari kebijakannya yang ingin melindungi keamanan nasional dan kepentingan nasional dari ancaman kejahatan transnasional serta mempertimbangkan kepentingan ekonomi dan sosial budayanya.

V. KESIMPULAN

Jepang merupakan negara kepulauan dengan sistem pmerintahan demokrasi terbesar di Asia dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ke dua di dunia setelah Amerika Serikat, atau tertinggi ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Uni Eropa. Menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi, Jepang memiliki pengalaman panjang dengan masalah demografi. Masyarakat Jepang yang cenderung tidak ingin menikah dan tidak memiliki keturunan menjadikan negera ini mengalami aging society dan penurunan angka kelahiran (shoushika). Prediksi dari berbagai survey menyatakan bahwa di masa depan, populasi lanjut usia di Jepang akan melebihi populasi usia produktif. Fenomena ini sebenarnya telah dirasakan Jepang sejak lama, namun pemerintah tidak menyadari bahwa fenomena ini justru akan membawa Jepang pada masalah yang lebih besar.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuan ekonomi, inovasi teknologi dan manufaktur serta keinginan Jepang mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai target tahunannya menjadikan Jepang membutuhkan tenaga ahli maupun non ahli. Akan tetapi jumlah seluruh masyarakat produktif di Jepang tidak mampu mengisi kekosongan lapangan pekerjaan yang tersedia. Kondisi ini terus berlanjut hingga pada akhirnya pada tahun 2018 Jepang mengalami titik tertinggi ketersediaan lapangan pekerjaan selama 40 tahun terakhir. Pengusaha kecil hingga menengha mengeluhkan kesulitan dalam merekrut tenaga kerja. Kondisi ini membuat pemerintah mencarri alternatif solusi yaitu dnegan memaksimalkan peranan ibu rumah tangga dan warga lanjut usia yang telah pensiun meski hanya sebagai pekerja paruh waktu. Solusi tersebut tidak benar-benar memecahkan masalah kekurangan tenaga kerja sehingga para intelektual dan ekonom menyarankan agar Jepang agar menarik pekerja asing.

Di satu sisi, Jepang merupakan negara yang tidak ramah dengan para imigran dan pencari suaka. Terbukti dari data UNHCR, Jepang hanya menerima kurang dari 100 pencari suaka setiap tahunnya. Tindakan Jepang ini dianggap sebagai pelanggarana HAM terhadap para pengungsi. Padahal mengingat kondisi Jepang yang kekurangan tenaga kerja, Jepang bisa saja memanfaatkan para pencari kerja sebagai potensi dalam memenuhi lepanagan peekrjaan yang tersedia. Tindakan Jepang yang mengetatkan penerimaan suaka mendapat kritik tidak hanya dari UNHCR namun juga organisasi internasional seperti Human Right Watch dan Amnesty International yang mendesak agar Jepang mematuhi Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951 dan Protokol tentang Kedudukan Pengungsi 1967 (*1951 Convention Regarding the Status of Refugees and 1967 Protocol Relating to the Status of Refugee*) dimana Jepang sebagai negara yangmengkasesi artinya sudah seharusnya Jepang menaati, menghormati dan patuh pada seluruh isi perjanjian tersebut. Jepang juga sebagai negara yang meratifikasi *Universal Declaration of Human Rights* dimana pada pasal 14 terdapat hak bagi pencari suaka.

Tindakan Jepang yang memperketan penerimaan pencari suaka sebagai pekerja imigran menjadi pertanyaan mengapa Jepang tidak memanfaatkan para pencari suaka tersebut sebagai pekerja disaat Jepang terus menyatakan diri sebagai negara yang sedang mengalami krisis tenaga kerja. Desember tahun 2018, melalui parlemennya Jepang kemudian mengeluarkan Revisi Undang-Undang Kontrol Imigrasi yang berisi penerimaan pekerja asing selama 5 tahun ke depan. Meski kebijakan tersebut merupakan kebijakan keterbukaan imigrasi, namun Jepang enggan menyebutnya sebagai penerimaan para imigran.

Diketahui tindakan selektif Jepang

yang terbatas kepada para pencari suaka dikarenakan beberapa faktor yaitu merujuk pada karakteristik masyarakat Jepang. Memiliki sejarah isolasi panjang, masyarakat Jepang tampaknya masih belum bisa menerima internasionalisasi dan perubahan. Sikap tersebut didasari atas karakter masyarakat yang homogen. Selain itu, ketakutan Jepang terhadap kejahatan yang dilakukan orang asing terutama negara sekitar juga menjadi faktor lain. Jepang juga memiliki pengalaman buruk dengan Cina maupun Korea Utara. Pemerintah Jepang dalam mengambil keputusan pembatasan penerimaan suaka sebagai pekerja imigran adalah sebagai upaya dalam melindungi warga negaranya dan kepetingan nasionalnya dari tindakan kejahatan transnasional. Terlebih lagi jika Jepang menerima pencari suaka yang di dominasi dari negara konflik di Timur Tengah dimana ideologi para pencari suaka sangat berbeda dengan ideologi warga tuan rumah.

Mayarakat Jepang memang memiliki budaya yang unik, dan untuk mempertahankan kemurnian budaya tersebut, asimilasi dari budaya asing seharusnya batasi. Hal ini memicu kritik bahwa masyarakat homogen Jepang merupakan masyarakat yang tidak dapat menerima perubahan dan cenderung rasis hingga Xenophobia. Beberapa literatur kemudian bermunculan untuk menanggapi hal tersebut. Literatur mengenai masyarakat Jepang yang kini tengah menjadi masyarakat multikultur dan heterogen sebagai sebuah pernyataan yang tidak dapat dibuktikan dan tetap saja tidak mampu menutupi homogenitas yang telah berakar.

"*Tidaklah cukup untuk melawan satu mitos dengan menghancurkannya lalu menggantinya dengan mitos yang lain lagi, seperti misalnya mengkritik mitos bangsa yang homogen lalu menggantinya dengan mitos bangsa yang beragam"* (Oguma 2002:349)

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan luar negeri Pemerintah Jepang pada masa Shinzo Abe terkait pembatasan penerimaan suaka karena pemerintah Jepang masih terikat dengan masyarakat Jepang yang merupakan warga negara yang harus di lindungi dan kepentingannya dipenuhi. Terlebih lagi identitas dan budaya unik yang Jepang miliki merupakan nilai tak terharga. Oleh karena itu, Jepang sangat berhati-hati dalam menerima budaya asing yang masuk ke Jepang. Jepang juga tidak ingin menerima begitu saja para pencari suaka sebagai pekerja di Jepang oleh sebab itu, Jepang mengeluarkan kebijakan terkait Undnag-undang Kontrol Imigrasi sebagai tindakan selektif dalam mencari pekerja imigran yang kompeten untuk bekerja di Jepang.

Referensi

Agusman, D. D. (2013). Book Review: Treaties Under Indonesian Law. *Jurnal Opinio Juris, Vol 6. No. 2 Agustus*, 1-30.

Allison, G. T. (1969). Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis. *The American Political Science Review,Volume 63, Issue 3* , 694-695.

Allison, G. T. (1971). *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis.* Little, Brown and Company.

Amnesty Internasional. (2019, January 24). *WHAT'S THE DIFFERENCE BETWEEN A REFUGEE AND AN ASYLUM SEEKER?* Retrieved October 10, 2019, from amnesty.org: https://www.amnesty.org.au/refugee-and-an-asylum-seeker-difference/

Amnesty International. (2017, November). *JAPAN: INADEQUATE PROTECTION AGAINST DISCRIMINATION*. Retrieved October 15, 2019, from AMNESTY INTERNATIONAL SUBMISSION FOR THE UN UNIVERSAL PERIODIC: https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2265442017ENGLISH.pdf

Aust, A. (2000). *Modern Treaty Law and Practice.* Cambridge: Cambridge University Press.

Autor, D., & Salomons, A. (2018). Is Automation Labor Share–Displacing? Productivity Growth, Employment, and the Labor. *Brookings Papers on Economic Activity , (SPRING 2018)*, 1-63.

Bahar, D., & Dooley, M. (2019, December 9). *Venezuela Refugee Crisis to Become the Largest and Most Underfunded in Modern History*. Retrieved December 12, 2019, from Broking.edu: https://www.brookings.edu/blog/up-front/2019/12/09/venezuela-refugee-crisis-to-become-the-largest-and-most-underfunded-in-modern-history/

Bandyopadhyay, S. (2013). Partitioned Lives: Migrants, Refugees, Citizens in India and Pakistan, 1947-1965. *The American Historical Review Vol. 118; Issue. 5*, 1506-1507.

Bartram, D. (2000). Japan and Labor Migration: Theoretical and Methodological Implications of Negative Cases. *The International Migration Review, Vol. 34, No. 1* , 1-27.

Betts, A., Loescher, G., & Milner, J. (2012). *UNHCR: The Politics and Practice of Refugee Protection.* Oxford: Routledge Taylor & Francis Group.

Bianchini, K. (2018). Protecting stateless persons : the implementation of the convention relating to the status of stateless persons across EU states. *International Refugee Law Series. Volume 11*, 1-2.

Boyne, S. (2017, February 6). *The "Japanese-ness" of Religion in Japan*. Retrieved December 1, 2019, from Berkley Center : https://berkleycenter.georgetown.edu/posts/the-japanese-ness-of-religion-in-japan

Brody, B. (2002). *Opening the Door: Immigration, Ethnicity, and Globalization in Japan.* New York: Routledge.

Burgees, C. (2007). Jepang yang multikultur? Wacana dan mitos homogenitas. *The Asia-Pacific Journal: Japan Focus*, 1-37.

Chan, T. F. (2018, April 11). *NO ENTRY: How Japan's shockingly low refugee intake is shaped by the paradox of isolation, a demographic time bomb, and the fear of North Korea*. Retrieved October 22, 2019, from Business Insider Singapore: https://www.businessinsider.sg/why-japan-accepts-so-few-refugees-2018-4/?r=US&IR=T

Clark, R. L., Ogawa, N., Kondo, M., & Matsukura, R. (2010). Population Decline, Labor Force Stability, and the Future of the Japanese Economy. *European Journal of Population / Revue Européenne de Démographie, Vol. 26, No.2, Economic Consequences of Low Fertility in Europe*, 207-227.

Cochrane, R. (1947). Labor Is Necessary. *The Phi Delta Kappan, Vol. 29, No. 3*, 1-5.

Darmawan, A. (2016). Makalah Perjanjian Internasional (Ratifikasi, Aksesi dan Reservasi). *Academia.edu*, 1-20.

Dean, M. (2006). JAPAN: REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS. *WRITENET independent analysis*, 1-46.

Deguchi, H. (2018, December 04). *A new immigration policy for Japan*. Retrieved October 20, 2019,

from The Japantimes: https://www.japantimes.co.jp/opinion/2018/12/04/commentary/japan-commentary/new-immigration-policy-japan/#.XavIaPkzbIX

Dolinger, J. (2016). The Failure of the Universal Declaration of Human Rights. *The University of Miami Inter-American Law Review , Vol. 47, No. 2*, 164-199.

Dooley, B. (2019, August 8). *Japan Posts Surprising Growth, but Economic Threats Loom*. Retrieved October 26, 2019, from The New York Times: https://www.nytimes.com/2019/08/08/business/japan-economy.html#targetText=Japan's%20economy%2C%20the%20third%20largest,Friday%20by%20the%20country's%20cabinet.&targetText=But%20Japan%20is%20steeling%20itself%20for%20a%20run%20of%20economic%20challenges.

Dörr, O., & Schmalenbach, K. (2011). *Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary*. London: Springer Heidelberg Dordrecht.

Dougherty, J. E. (1990). Contending Theories of International Relations. In R. L. Jr.. Massachusetts: The Fletcher School of Law and Diplomacy Tuffts University.

Elliott, A., & Milne, D. (2019). War Tourism and Modern Japan. *Japan Review , No. 33, Special Issue: War, Tourism, and Modern Japan*, 3-28.

Ellis Island Foundation. (2019). *Immigration Timeline*. Retrieved December 10, 2019, from The Statue of Liberty - Ellis Island Foundation, Inc.: https://www.libertyellisfoundation.org/immigration-timeline

Favel, A. (2018). The New European Migration Laboratory: East Europeans in West European Cities. In P. Scholten, & M. v. Ostaijen, *Between Mobility and Migration: The Multi-Level Governance of Intra-European Movement* (pp. 263-270). Cham: Springer Open.

Flowers, P. R. (2008). Failure to Protect Refugees? Domestic Institutions, International Organizations, and Civil Society in Japan. *The Journal of Japanese Studies Vol. 34, No. 2*, 333-361.

Frédéric, L. (2002). *Japan Encyclopedia*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University.

Gibney, M. (1994). *Global Refugee Crisis : : A Reference Handbook*. California: ABC-CLIO, LLC.

Global Sherpa. (2019, December). *Japan – Country Profile, Facts, News and Original Articles*. Retrieved December 1, 2019, from Global Sherpa: http://globalsherpa.org/japan/

Glowgoski, P. A. (2018, October 24). *Economic Costs of Japanese Immigration Policy*. Retrieved January 7, 2020, from Asia Explained: https://asiaexplained.org/2018/10/economic-costs-of-japanese-immigration-policy/

Green, D. (2017, March 28). *As Its Population Ages, Japan Quietly Turns to Immigration*. Retrieved November 6, 2019, from Migration Policy Intitute : https://www.migrationpolicy.org/article/its-population-ages-japan-quietly-turns-immigration

Hane, M., & Perez, L. G. (2012). *Modern Japan: A Historical Survey*. Philadelphia: Westview Press.

Hardoko, E. (2017, February 10). *Tahun Lalu, Hampir 2.000 WNI Mencari Suaka di Jepang*. Retrieved March 15, 2019, from Kompas Internasional: https://internasional.kompas.com/read/2017/02/10/22082671/tahun.lalu.hampir.2.000.wni.mencari.suaka.di.jepang

Harner, S. (2015, September 22). *Japan's Real Security Threats: Immigrant Assault And Failing, Self-Defeating Diplomacy* . Retrieved November 8, 2019, from Forbes: https://www.forbes.com/sites/stephenharner/2015/09/22/japans-real-security-threats-immigrant-assault-and-failing-self-defeating-diplomacy/#3c81079624e3

Hayes, L. D. (2015). *Political Systems of East Asia : China, Korea and Japan*. New York: Routledge.

Howe, C. (1999). *The Origins of Japanese Trade Supremacy: Development and Technology in Asia from 1540 to the Pacific War*. London: C. Hurst & Co. Publishers.

https://public.wsu.edu/~wsucr/principles.html. (n.d.). Retrieved November 25, 2019, from https://public.wsu.edu/: https://public.wsu.edu/~wsucr/principles.html

Human Rights Watch . (2017, January 12). *Japan: Improve Migrant Treatment, Accept Refugees (Global Investor, Donor, but Rights Leadership Lacking)*. Retrieved October 13, 2019, from https://www.hrw.org/news/2017/01/12/japan-improve-migrant-treatment-accept-refugees

Human Rights Watch. (2017). *World Report 2017 : Japan*. Retrieved November 11, 2019, from Human Rights Watch: https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/japan

Hutapea, R. U. (2017, November 3). *Baru 3 Orang yang Diterima, Jepang Diminta Tampung Lebih Banyak Pengungsi*. Retrieved March 15, 2019, from Detik News:

https://news.detik.com/internasional/d-3734841/baru-3-orang-yang-diterima-jepang-diminta-tampung-lebih-banyak-pengungsi?nocache=1

International Rescue Committee . (2018, June 22). *Migrants, asylum seekers, refugees and immigrants: What's the difference?* Retrieved October 18, 2018, from rescue.org: https://www.rescue.org/article/migrants-asylum-seekers-refugees-and-immigrants-whats-difference

Japan Broadcasting Corporation. (2017, October 02). *Companies Across Japan Deal With Labor Shortage Using Cutting-Edge Technology*. Retrieved October 24, 2019, from NKH World: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/backstories/68/?cid=nwd-adwords-all_site_dsa-201905-000

Japan Broadcasting Corporations. (2019, May 5). *Populasi Anak Turun 38 Tahun Berturut-turut*. Retrieved May 6, 2019, from NHK World-Japan: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/id/news/154422/

Japan Broadcasting Corporations. (2019, May 5). *Populasi Anak Turun 38 Tahun Berturut-turut*. Retrieved October 27, 2019, from NHK-World Japan: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/id/news/154422/

Japan International Training Cooperation Organization. (2017). *What is the Technical Intern Training Program?* Retrieved October 16, 2019, from https://www.jitco.or.jp/en/regulation/index.html

Japan Ministry of Education. (2016, May 14-15). Kurashiki Declaration. *G7 Kurashiki Education Ministers' Meeting in Okayama*, pp. 2-3.

Japan National Tourism Organizations. (2018). Retrieved October 28, 2019, from https://statistics.jnto.go.jp/en/graph/#graph--latest--figures

Kajita, T. (1995). CHARACTERISTICS OF THE FOREIGN WORKER PROBLEM IN JAPAN: TO AN ANALYTICAL. *Hitotsubashi Journal of Social Studies, Vol. 27, No. 1*, 1-26.

Kesuma, R. P. (2018). POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN HUBUNGAN DENGAN NEGARA-NEGARA MELANESIA DI ERA PRESIDEN JOKO WIDODO 2014-2016. *REPOSITORY UMY*, 9.

Kodama, F. (1992). Japan's Growing Technological Capability: Implications for the U.S. Economy. In N. r. Council, *Japan's Unique Capability to Innovate: Technology Fusion and its International Implications* (pp. 147-149). Washington DC: The National Academies Press.

Kumagai, F. (2010). Forty Years of Family Change in Japan: A Society Experiencing Population Aging and Declining Fertility. *Journal of Comparative Family Studies, Vol. 41, No. 4, 40th ANNIVERSARY*, 581-610.

Kyodo. (2019, March 28). *Japan marked first fall in asylum-seekers in eight years in 2018 amid tougher screening*. Retrieved October 11, 2019, from The Japan Times News: https://www.japantimes.co.jp/news/2019/03/28/national/japan-marked-first-fall-asylum-seekers-eight-years-2018-amid-tougher-screening/#.XaAiB2AzbIU

Kyodo. (2019, March 15). *Rules issued for firms hiring foreign workers via new system, including pay parity with Japanese*. Retrieved October 22, 2019, from The Japantimes: https://www.japantimes.co.jp/news/2019/03/15/national/rules-issued-firms-hiring-foreign-workers-via-new-system-including-pay-parity-japanese/#.Xa5XQfkzbIV

Lufkin, B. (2018, December 28). *Populasi penduduk semakin tua, Jepang darurat tenaga kerja*. Retrieved Maret 15, 2019, from BBC News: https://www.bbc.com/indonesia/vert-cap-46650491

Luftkin, B. (2018, December 28). *Populasi penduduk semakin tua, Jepang darurat tenaga kerja*. Retrieved March 15, 2019, from BBC News: https://www.bbc.com/indonesia/vert-cap-46650491

Mainichi Japan. (2017, September 10). *Labor shortage forces fast food chains, convenience stores to turn to housewives*. Retrieved October 29, 2019, from The Mainichi: https://mainichi.jp/english/articles/20170910/p2a/00m/0na/006000c

Mainichi Japan. (2018, February 1). *71% of Japanese firms short of workers: survey*. Retrieved October 29, 2019, from The Mainichi: https://mainichi.jp/english/articles/20180201/p2a/00m/0na/005000c

Mainichi Japan. (2019, October 22). *Seven-Eleven Japan to end some 24-hour operations amid labor crunch*. Retrieved October 19, 2019, from The Mainichi:

https://mainichi.jp/english/articles/20191022/p2g/00m/0bu/007000c
Mangunhardjana, A. (1997). *Isme-isme dalam Etika dari A sampai Z.* Yogyakarta: Kanisius.
Martin, S. F. (2016). The Global Refugee Crisis. *Georgetown Journal of International Affairs, Vol. 17, No. 1*, 5-7.
Mas'oed, M. (1994). *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi.* Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
Mas'oed, M. (1994). *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi.* Jakarta: PT. Pustaka LP3S Indonesia.
Maynard, P. D. (1982). The Legal Competence of the United Nations High Commissioner for Refugees. *The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 31, No. 3*, 415-425.
McBrien, J. L. (2017). Refugees, Asylum Seekers, and Other Immigrants : Help for teachers with problematic definitions. *Social Studies Research and Practice, Vol. 12 Issue: 2*, 115-121.
Meadway, J. (2010, November 4). *How did the world get so fixated on GDP?* . Retrieved November 13, 2019, from The Guardian: https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/aug/10/gdp-growth-japan?INTCMP=SRCH
Michaelidis, G., & Lindsay, J. M. (2003, May 13). *Immigrants and National Security*. Retrieved November 11, 2019, from Brookings.edu: https://www.brookings.edu/opinions/immigrants-and-national-security/
Mie, A. (2016, May 25). *Leaders expected to focus on economy, refugee crisis*. Retrieved October 15, 2019, from The Japantimes: https://www.japantimes.co.jp/news/2016/05/25/national/leaders-expected-focus-economy-refugee-crisis/#.XaXPK2AzbIU
Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2017). *Japan's Foreign Policy to Promote National and Worldwide Interests*. Retrieved October 12, 2019, from Diplomatc Blue Book: https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2017/html/chapter3/c030105.html
Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2018, October 31). *White Paper on Development Cooperation 2017*. Retrieved October 10, 2019, from White Paper on Development Cooperation / Japan's ODA White Paper: https://www.mofa.go.jp/policy/oda/page_000017.html
Ministry of Health, Labor and Welfare. (2019, July 8). *Overview of water supply services*. Retrieved November 30, 2019, from Japan's Ministry of Health, Labor and Welfare Website: https://web.archive.org/web/20180126130519/https://www.mhlw.go.jp/english/policy/health/water_supply/1.html
Ministry of Internal Affairs and Communications . (2019, November 1). *Monthly Report*. Retrieved December 1, 2019, from Statistic Bureau of Japan: http://www.stat.go.jp/english/data/jinsui/tsuki/index.html
Ministry of Justice Japan. (2019). *Recognition of Refugees*. Retrieved October 13, 2019, from http://www.moj.go.jp/ENGLISH/index.html
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. (2007). *The Land and the People*. Retrieved December 1, 2019, from Land and Climate of Japan: https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/english/land.html
Miyakawa, Y. (1981). Evolution of Japan's industrial system. *Ekistics, Vol. 48, No. 289, JAPAN'S ORGANIZATION OF SPACE* , 273-280.
Miyashita, Y. (2018, February 28). *Pencari Suaka di Jepang Tahun 2017 dan Peraturan Baru*. Retrieved October 10, 2019, from SukaSuki.org: https://www.sukasuki.org/2018/02/pencari-suaka-di-jepang-tahun-2017-dan-peraturan-baru/
Morey, E. R. (2018). What are the ethics of welfare economics? And, are. *International Review of Economics*, 15-21.
Morin, J.-F., & Paquin, J. (2018). *Foreign Policy Analysis : A Toolbook.* Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
Moritsugu, K. (2017, October 23). *Japan election results: Shinzo Abe scores major victory for ruling coalition and pledges to reform pacifist constitution*. Retrieved October 2019, 2019, from Independent: https://www.independent.co.uk/news/world/asia/japan-election-results-shinzo-abe-north-korea-pacifist-constitution-reform-liberal-democratic-party-a8014861.html
Morley, J. W. (1998). *Driven by Growth: Political Change in the Asia-Pacific Region.* New York: Routledge.
Murakami, S. (2019, August 23). *Abe tied as longest-serving postwar Japanese leader with great-*

uncle Sato at 2,798 days. Retrieved October 20, 2019, from The Japantimes: https://www.japantimes.co.jp/news/2019/08/23/national/politics-diplomacy/abe-becomes-longest-serving-postwar-japanese-leader-tying-great-uncle-sato-2798-days/#.Xau7aPkzbIU

Murase, S. (1977). The Status of Political Refugees in Japan. *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law), Vol.71*, 155-159.

Nakaso, H. (2017). *Japan's Way toward Strong, Sustainable, and Balanced Growth: Assessment of the potential of the Japanese economy suggests.* Tokyo: Bank Of Japan.

Nasr, L., & Fisk, R. P. (2018). The global refugee crisis: how can transformative. *The Service Industries Journal*, 1-18.

Obe, M. (2018, November 28). *Five things to know about Japan's foreign worker bill*. Retrieved October 22, 2019, from Nikkei Asian Review: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Japan-immigration/Five-things-to-know-about-Japan-s-foreign-worker-bill

Obe, M. (2018, November 28). *Five Things to Know About Japan's Foreign Worker Bill*. Retrieved March 15, 2019, from Nikkei Asian Review: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Japan-immigration/Five-things-to-know-about-Japan-s-foreign-worker-bill

Obe, M. (2019, April 01). *Five things to know about Japan's revised immigration law*. Retrieved October 20, 2019, from Nikkei Asian: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Japan-immigration/Five-things-to-know-about-Japan-s-revised-immigration-law

OECD. (2018). Retrieved October 26, 2019, from https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm

OECD. (2018). Retrieved October 26, 2019, from https://data.oecd.org/industry/tourism-gdp.htm#indicator-chart

Okuda, K. (2019, February 2). *Japan's female employment tops 50% for 1st time in half-century*. Retrieved October 31, 2019, from Nikkei Asia: https://asia.nikkei.com/Economy/Japan-s-female-employment-tops-50-for-1st-time-in-half-century

Okunishi, Y. (1995). Labor Migration In Asia : Japan. *ASEAN Economic Bulletin, Vol. 12, No. 2*, 139-159.

Ormsby, E. A. (2017). The Refugee Crisis as Civil Liberties Crisis. *Columbia Law Review, Vol. 117, No. 5*, 1191-1229.

Oshio, T. (2018). Labor force participation of the elderly in Japan. *Institute for Economics Research, Hitotsubashi University Jurnal*, 1-22.

Peek, J. M. (1992). *Japan, The United Nations, and Human Rights* . California: University of California Press.

Piggott, J. R. (1997). *The Emergence of Japanese Kingship.* California: Stanford University Press.

Plano, J. C., & Olton, R. (1988). *The International Relation Dictionary.* Oxford: Clio Press Ltd.

Prime Minister and Cabinet. (1946, November 3). *The Constitution of Japan*. Retrieved December 2, 2019, from Cabinet Public Relation of Japan: http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html

Rahmat, F. S. (2009). Penelitian Kualitatif. *EQUILIBRIUM, Vol. 5, No. 9*, 2-3.

Refugee Council. (2019). *Asylum seekers and refugees - who's who?* Retrieved October 12, 2019, from https://www.refugeecouncil.org.uk/information/refugee-asylum-facts/the-truth-about-asylum/

Reynolds, I. (2018, October 18). *Abe wants foreigners to bolster Japan's shrinking workforce but finds vocal resistance*. Retrieved October 13, 2019, from TheJapantimes News: https://www.japantimes.co.jp/news/2018/10/18/national/social-issues/japan-first-led-protesters-slam-abe-plan-allow-foreign-workers/#.XaKZQ2AzbIW

Richey, S. (2010). The Impact of Antí-Assimilatíonist Beliefs on Attitudes toward Immigration. *International Studies Quarterly, Vol. 54, No. 1*, 197-212.

Sari, A. P. (2015, September 30). *Alasan Jepang Enggan Menerima Pengungsi Suriah*. Retrieved March 15, 2019, from CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150930142825-113-81854/alasan-jepang-enggan-menerima-pengungsi-suriah

Sari, A. P. (2015, September 9). *Imigran Banjiri Eropa, Jepang Justru Akan Tekan Pencari Suaka*. Retrieved March 2019, 2019, from CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150909202846-113-77742/imigran-banjiri-

eropa-jepang-justru-akan-tekan-pencari-suaka
Satatistic Bureau of Japan. (2019). *2018 Yearly Average Results*. Retrieved October 30, 2019, from https://www.stat.go.jp/english/data/roudou/results/annual/ft/index.html
Sebayang, R. (2018, September 20). *Shinzo Abe Terpilih Lagi, Jadi PM Jepang Paling Lama*. Retrieved May 7, 2019, from CNBC Indonesia: https://www.cnbcindonesia.com/news/20180920194125-4-34095/shinzo-abe-terpilih-lagi-jadi-pm-jepang-paling-lama
Shahrullah, R. S., & Aburto, A. C. (2012). Asylum Seeker in Japan : A Hard Road. *Jurnal MIMBAR HUKUM UGM, Vol 27, No. 1*, 1-129.
Shirai, S. (2019, May 26). *Japan's Labor Shortage and Low-wage Puzzle*. Retrieved October 25, 2019, from The Japantimes: https://www.japantimes.co.jp/opinion/2019/05/26/commentary/japan-commentary/japans-labor-shortage-low-wage-puzzle/
Sıddıkoğlu, H. (2017). Refugee and Asylum Seeking in Modern Japan: Analysis of Japan's Humanitarian Commitments and Xenophobic Problems. *THE JOURNAL OF MIGRATION STUDIES Volume: 3, No: 2* , 40-64.
Skrentny, J. D. (2013). How to Understand Immigration Policy. *The Brown Journal of World Affairs, Vol. 20, No. 1 (FALL / WINTER 2013)*, 140-142.
Solis, M. (2012, September 28). *Shinzo Abe's Surprising Victory*. Retrieved October 20, 2019, from brokings.edu: https://www.brookings.edu/blog/up-front/2012/09/28/shinzo-abes-surprising-victory/
Taeko, Y., & Urabe, E. (2019, March 5). *Japan Needs More Foreign Workers, New Government Adviser Says*. Retrieved March 15, 2019, from Bloomberg: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-04/new-voice-on-abe-s-economic-panel-calls-for-more-foreign-workers
Takizawa, S. (2019, August 29). *Japan has larger role to play in refugee crisis*. Retrieved October 2019, 2019, from The Japan News: https://the-japan-news.com/news/article/0005963423?fp=6ffb2dba8fe70f10e3d59d45119b4a9a
Tasker, P. (2018, November 16). *Why large-scale immigration would be bad for Japan : Abe's expansion of foreign worker schemes risks creating social and political tensions*. Retrieved November 8, 2019, from Nikkei Asian Review: https://asia.nikkei.com/Opinion/Why-large-scale-immigration-would-be-bad-for-Japan
The Guardian. (2017, December 27). *Japan to limit work permits for asylum seekers from 2018*. Retrieved November 11, 2019, from The Japantimes News: https://www.japantimes.co.jp/news/2017/12/27/national/crime-legal/japan-limit-work-permits-asylum-seekers-2018/#.XcIr5_kzbIV
The Guardian. (2017, October 22). *Shinzo Abe wins resounding victory in Japan, exit polls say*. Retrieved October 20, 2019, from BBC News: https://www.bbc.com/news/world-asia-41711369
The Guardian. (2018, November 02). *Jepang Buka Keran Impor Buruh, Oposisi Menentang Keras*. Retrieved October 22, 2019, from CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181102153706-113-343545/jepang-buka-keran-impor-buruh-oposisi-menentang-keras
The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees. (2010). Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees. *The United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons* (pp. 1-52). Geneva: UNHCR Communications and Public Information Service.
Tian, Y., & Chung, E. A. (2018, August 3). *Is Japan Becoming a Country of Immigration?* Retrieved November 8, 2019, from Foreign Affairs: https://www.foreignaffairs.com/articles/japan/2018-08-03/japan-becoming-country-immigration
Tomonaga, K. (1998). Japan and the 50th Anniversary of UDHR. *Buraku Liberation Research Institute, Focus March Volume 11*, 1-4.
Tondo, L. (2019, August 25). *Nearly 900,000 asylum seekers living in limbo in EU, figures show*. Retrieved December 10, 2019, from The Guardian: https://www.theguardian.com/world/2019/aug/25/asylum-seekers-limbo-eu-countries

Totten, S., & Bartrop, P. R. (2008). *Dictionary of Genocide.* London: Greenwood Press.
Tsujiuchi, M. (1996). NATIONAL IDENTITY IN THE UNITED STATES AND JAPAN. *Hitotsubashi Journal of Social Studies*, 1-9.
Tucker, J. A. (2017, October 15). *How Much Homogeneity Does Society Need?* Retrieved November 12, 2019, from Foundation of Economic Education: https://fee.org/articles/how-much-homogeneity-does-society-need/
UNESCO. (2019). Retrieved October 29, 2019, from https://whc.unesco.org/en/statesparties/jp
UNHCR . (2019). *UNHCR The UN Refugee Agency*. Retrieved October 12, 2019, from http://popstats.unhcr.org/en/overview#_ga=2.20826288.94497106.1570848789-939039172.1570687764
UNHCR. (2011). *THE 1951 CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES AND ITS1967 PROTOCOL.* Geneva: UNHCR.
UNHCR. (2015). States Parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol. *Status of treaties 1951 and 1967 for UNHCR website*, 1-5.
UNHCR. (2018). Global Trends Forced Diplacement In 2018. *2018 In Review*, 1-76.
UNHCR. (2019). *The 1951 Refugee Convention*. Retrieved November 2, 2019, from https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html
United Nations Refugee Agency. (2019). *What is a Refugee?* Retrieved October 17, 2019, from https://www.unrefugees.org/refugee-facts/what-is-a-refugee/
United States Department of State. (2018, June 28). *2018 Trafficking in Persons Report - Japan.* Retrieved November 8, 2019, from REFWORLD | The Leader in Refugee Decision Support: https://www.refworld.org/docid/5b3e0b0da.html
United States Department of State. (2018, September 19). *Country Reports on Terrorism 2017 - Foreign Terrorist Organizations: Aum Shinrikyo*. Retrieved November 11, 2019, from REFWORLD | The Leader in Refugee Decision Support: https://www.refworld.org/country,,,,JPN,,5bcf1f4f13,0.html
USA for UNHCR. (2019). *Syiria Refugee Crisis*. Retrieved December 10, 2019, from UNHCR: https://www.unrefugees.org/emergencies/syria/
Usuda, K. (2017, October 20). *Abe's 'Japan First' immigration policy*. Retrieved October 2019, 12, from Japan Today: https://japantoday.com/category/features/opinions/abe%E2%80%99s-%E2%80%98japan-first%E2%80%99-immigration-policy
Watanabe, T. (1972). Improvement of Labor Quality and Economic Growth. Japan's Postwar Experience. *Economic Development and Cultural Change, Vol. 21, No. 1*, 33-50.
Weiss, T. G. (2003). Internal Exiles: What Next for Internally Displaced Persons? *Third World Quarterly, Vol. 24, No. 3*, 2-3.
Whittaker, D. J. (2006). *Asylum Seeker and Refugees In the Contemporary World.* New York: Routledge Taylor and Francis Group.
Widiandari, A. (2016). FENOMENA SHOUSHIKA DI JEPANG : PERUBAHAN KONSEP ANAK. *E-Journal Undip Izumi, Volume 5, No 1*, 32.
Wilson, T. (2017, February 7). *Japan took in just 28 refugees in 2016, despite record applications*. Retrieved October 13, 2019, from Reuters: https://www.reuters.com/article/us-japan-asylum/japan-took-in-just-28-refugees-in-2016-despite-record-applications-idUSKBN15O0UV
Wohns, A. W. (2013). Calling All Gaijin! Immigration Reform for Japan. *Harvard International Review Vol. 35, No. 2*, 6-7.
World Travel & Tourism Council. (2019, March 20). *Japan retains position as 3rd largest Travel & Tourism economy in the world, says new WTTC research*. Retrieved October 29, 2019, from https://www.wttc.org/about/media-centre/press-releases/press-releases/2019/japan-retains-position-as-3rd-largest-travel-and-tourism-economy-in-the-world-says-new-wttc-research/#targetText=In%202018%2C%20Travel%20%26%20Tourism%20contributed,billion%20to%20
Wyman, M. (1998). *Dps: Europe's Displaced Persons, 1945-1951*. New York: Cornell University Press.
Yamaghuci, J. (2014, November 23). *Foreign workers in demand amid tourism surge*. Retrieved October 28, 2019, from The Japantimes News :

https://japantimes.co.jp/news/2014/11/23/business/foreign-workers-demand-amid-increase-tourists/#.XbVGl_kzbIU

Yamawaki, K. (2019, June 26). *Is Japan becoming a country of immigration?* Retrieved October 20, 2019, from The japantimes: https://www.japantimes.co.jp/opinion/2019/06/26/commentary/japan-commentary/japan-becoming-country-immigration/#.XaxHNPkzbIU

Yasaku, H., & Yoshikuni, O. (2018). Public Opposition to Refugee Resettlement: The case of Japan. *RIETI Discussion Paper Series 18-E-050*, 1-42.

Zieck, M. (2015). Guidelines on International Protection No. 11: Prima Facie Recognition of Refugee Status. *International Legal Materials , Vol. 54, No. 6* , 115-129.

Zlotnik, H. (1999). Trends of International Migration Since 1965: What Existing Data Reveal. *International Migration Vol. 37; Issue. 1*, 22-61.